

**PERKEMBANGAN PEMBAHARUAN DI KERAJAAN TURKI  
USMANI ABAD KE XIX-XX**

**Sahri Sumudin**

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan, Indonesia

[batutah@uiidalwa.ac.id](mailto:batutah@uiidalwa.ac.id)

**Mizuar**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

[Mizwarpohan@gmail.com](mailto:Mizwarpohan@gmail.com)

**Miftahul Khoiri**

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan, Indonesia

[techochoir@gmail.com](mailto:techochoir@gmail.com)

**Abstrak**

Kerajaan Islam di masa lampau yang berumur panjang adalah kerajaan Turki Usmani. Dalam perkembangannya, kerajaan ini mengalami pembaharuan di dalamnya yang terjadi di abad 19-20 M. Kajian artikel ini mendeskripsikan terkait Kerajaan Turki Usmani melalui perkembangan pembaharuan di dalamnya. Kajian artikel ini menggunakan metode sejarah yakni, heuristik, kritik, interpretasi, serta historiografi dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Hasilnya dikatakan bahwa, Pembaharuan di kerajaan Turki Usmani menempuh jalan yang panjang. Kekalahan demi kekalahan yang diderita oleh kerajaan Turki Usmani dalam perang-perangnya telah menggerakkan hati para Sultan untuk melakukan pembaharuan di berbagai bidang. Dalam perkembangannya terdapat tiga aliran pembaharuan yakni Barat, Islam dan Nasionalis. Aliran Barat mengatakan kemunduran kerajaan Turki Usmani disebabkan syariat yang menguasai seluruh segi kehidupan kerajaan Usmani. Pandangan aliran Islam mengatakan agama tidak pernah menjadi penghalang kemajuan, Turki justru mundur karena tidak menjalankan syariat Islam. Aliran Nasionalis berpendapat bahwa Turki mundur disebabkan oleh keengganan umat Islam yang tidak mengakomodir perubahan-perubahan.

**Kata kunci:** Perkembangan, Pembaharuan, Kerajaan Turki Usmani.

**Abstract**

*The longest-lived Islamic kingdom in the past was the Ottoman Empire. During its development, this kingdom experienced renewal within it which occurred in the 19-20 century AD. This article study describes the Ottoman Empire through the development of renewal within it. This article study uses historical methods, namely,*

# HISTORIA ISLAMICA

## Journal of Islamic History And Civilization

<http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/historia/index>

(E-ISSN: 2988-361X)

Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2023

---

*heuristics, criticism, interpretation, and historiography using a multidimensional approach. As a result, it is said that reform in the Ottoman Empire took a long road. The defeat after defeat suffered by the Ottoman Empire in its wars had moved the hearts of the Sultans to carry out reforms in various fields. In its development, there were three streams of reform, namely Western, Islamic and Nationalist. The Western school says that the decline of the Ottoman Empire was caused by the Sharia which controlled all aspects of life in the Ottoman Empire. The view of the Islamic sect is that religion has never been an obstacle to progress, Turkey has actually gone backwards because it does not implement Islamic law. The Nationalist sect believes that Turkey's decline was caused by the reluctance of Muslims who did not accommodate changes.*

**Keywords:** *Development, Reform, Ottoman Empire.*

### **Pendahuluan**

Kerajaan Turki Usmani muncul di saat Islam berada dalam era kemunduran. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat. Dengan luas wilayah meliputi Semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir dan Afrika Utara. Pada masanya kerajaan Turki Usmani selama beberapa abad menjadi ancaman bagi Kristen Eropa. Namun, kekalahan angkatan laut Turki di Leponto tahun 1571 dan kegagalan dalam penaklukan Wina tahun 1683 merupakan titik balik yang dianggap sebagai kemenangan Kristen Eropa melawan (Muslim) Turki. Kekalahan tersebut menunjukkan kelemahan angkatan perang dan kemerosotan Turki Usmani, sekaligus menandai pergeseran kekuasaan ke tangan Eropa. (Siti Maryam, 2017, p. 139)

Kekalahan-kekalahan ini mendorong Sultan dan pemuka-pemuka kerajaan Turki Usmani untuk menyelidiki sebab-sebab kekalahan mereka dan rahasia keunggulan lawan. Mereka mulai memperhatikan kemajuan Eropa terutama kemajuan Perancis sebagai negara terkemuka waktu itu. Sebagai evaluasi dari kekalahan itu, dilakukanlah usaha pembaharuan. Duta-duta pun dikirim ke Eropa untuk mempelajari kemajuan di sana secara dekat. Fokus perhatian para duta-duta tersebut adalah dibidang militer, administrasi pemerintahan, penerbitan, percetakan, pendidikan dan hukum.

Pembaharuan menempuh jalan sangat panjang dan mendapatkan tantangan ulama dan sultan sendiri, sehingga bila pembaharuan tersebut dianggap sepele dengan kebijakan sultan maka pembaharuan akan didukung dan bila dianggap mengancam eksistensi sultan maka akan dihentikan. Dalam beberapa kasus tidak sedikit kebijakan-kebijakan pembaharuan tersebut mendapatkan penolakan dari sultan maupun ulama dan bahkan melahirkan konflik di kerajaan Turki Usmani.

---

Tulisan ini membahas perkembangan pembaharuan di kerajaan Turki Usmani dan dinamika yang terjadi dalam pembaharuan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sejarah yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di masa lampau, dengan pendekatan multidimensional, penulis berusaha untuk menjelaskan perkembangan pembaharuan di kerajaan Turki Usmani sampai munculnya pemerintahan Turki modern. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori konflik. Menurut Lewis Alfred Coser, timbulnya konflik terhadap suatu kelompok dapat membuat kelompok tersebut menuju ke arah kemajuan atau perubahan yang diinginkan oleh individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. (Setiadi & Usman, 2011, p. 372) Coser menekankan bahwa konflik tidak hanya seputar hal negatif saja, namun terdapat sisi positif konflik terhadap suatu kelompok atau individu. Dalam teori konflik, Coser mempunyai pandangan bahwa konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok itu sendiri. Kesolidaritasan kelompok tersebut dapat didasarkan kepada persamaan golongan atau persamaan memiliki tujuan yang sama.

### **Metode Penelitian**

Kajian dalam artikel ini merupakan jenis kajian pustaka. Kajian ini difokuskan dalam kurun waktu abad 19-20 M dan mengambil tempat di Turki dengan memfokuskan pada kerajaan Turki Utsmani sebagai kajiannya. Dalam kajian ini, penulis memakai metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni, pertama heuristic, dengan mengumpulkan buku-buku serta artikel yang terkait dengan Turki Usmani. Kedua kritik, dengan terkumpulnya buku-buku serta artikel tersebut kemudian penulis kritik terkait isi dari buku dan artikel tersebut terkait kebenarannya. Ketiga interpretasi, dengan menafsirkan bahan-bahan yang sudah terkumpul serta melalui pengkritikan. Keempat baru menuangkan dalam bentuk tulisan artikel yang disebut dengan historiografi.

### **Kepeloporan Sultan Dalam Pembaharuan**

Pengaruh Eropa terhadap dunia Islam menyadarkan pemimpin kerajaan Usmani untuk mengadakan perubahan. Keharusan untuk melakukan modernisasi juga akibat kegagalan menaklukkan Wina serta beberapa wilayah kerajaan Usmani yang dicaplok negara-negara Eropa. Sultan tidak saja sebagai penguasa atas wilayah kekuasaan Turki Usmani namun ia juga sebagai khalifah bagi umat Islam. Kekalahan demi kekalahan yang terjadi pada kerajaan Turki Usmani dalam peperangannya, harus dicari solusi agar tidak terjadi ketertinggalan dari Eropa sehingga terjadilah

---

pembaruan di kerajaan Turki Usmani yang dipelopori Sultan-sultan dari kerajaan Turki Usmani. (Siti Maryam, 2017, p. 142)

Kepeloporan Sultan dalam pembaruan, dilaksanakan pada masa Sultan Salim III berkuasa tahun 1789-1807, usaha-usaha pembaruannya dikenal dengan program *Nijami Jedid* (Orde Baru), Sultan Salim III adalah peletak dasar pembaruan Turki Modern. Naiknya Sultan Salim III pada tahta kerajaan Turki Usmani pada tahun 1789 segera diikuti dengan meletusnya revolusi Perancis yang membuka era pencerahan baru dan tatanan sosial yang demokratis di Eropa. Hal ini sangat sangat mempengaruhi kerajaan Turki Usmani lebih dari revolusi sosial lainnya di daratan Eropa. Rencana yang dipersiapkan Sultan Salim III terutama dibidang militer. (Mukti, 1994, p. 24)

Bidang militer menjadi perhatian serius modernisasi Sultan Salim III, ia berusaha meningkatkan kemampuan pasukan *Jenissery* dengan mengharuskan mereka mengikuti pendidikan dan latihan terprogram di bawah instruktur Perancis. Modernisasi ini dilakukan karena buruknya kinerja pasukan Usmani tradisional dalam perang melawan Rusia. Demikian juga hak istimewa untuk menjadi tentara *Jenissery* secara turun menurun dihapuskan dan diganti dengan keharusan mengikuti proses seleksi berdasar ukuran profesional. *Jenissery* juga dituntut untuk menguasai strategi dan teknologi militer modern. Dan yang paling keras dilarang terlibat dalam kegiatan non militer pada masa lalu. (Usman, 2016, p. 393)

Program pembaruan Sultan Salim III tidak mendapatkan dukungan ulama. Para ulama memainkan peran negatif dalam program pembaruan Sultan Salim III. Mereka menekankan bahwa pembaruan dilakukan apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tahun 1807 Sultan Salim III berhasil digulingkan dan akhirnya terbunuh oleh kombinasi kekuatan-kekuatan anti pembaruan, Dengan terbunuhnya Sultan Salim III menunjukkan berlanjutnya kekuatan konservatif dalam pemerintahan kerajaan Turki Usmani. (Zurcher, 2003, p. 24)

Dengan kematian Sultan Salim III, orde baru untuk sementara menjadi beku. Tetapi pembukaan misi diplomatik di London, Wina, Paris dan Berlin pada waktu pemerintahan Sultan Salim III telah membuka pintu kerajaan Turki Usmani untuk negara-negara Eropa. Pengaruh Eropa telah masuk dalam Imperium Turki Usmani, peninggalan Sultan Salim III jalan mengalirnya pengaruh Barat menjadi semakin luas dan kelompok pembaruan tumbuh dengan sangat kuat. (Mukti, 1994, p. 35)

Usaha pembaruan terus berkembang setelah Sultan Mahmud II dinobatkan menjadi Sultan pada tahun 1808 yang menggantikan Sultan Salim III. Di era Sultan Mahmud II, pembaruan tidak hanya terbatas pada modernisasi administrasi dan militer. Menurutnya hanya dengan pembaruan yang sangat luas dalam pemerintahan

---

dan masyarakat kerajaan Usmani dapat mempertahankan keutuhan wilayahnya dari serangan Eropa.

Di awal pemerintahannya ia disibukkan dengan peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai otonomi besar. Tahun 1812 perang dengan Rusia selesai dan kekuasaan otonomi daerah dapat diperkecil. Setelah kekuasaannya kuat, Sultan Mahmud II melihat bahwa telah tiba masanya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama ada dalam pikirannya. Para ulama dan pasukan *Jenissery* merupakan halangan utama bagi pembaruannya. (Nasution, 1975, p. 83)

Untuk menjamin pelaksanaan pembaruan-pembaruan selanjutnya, sultan sebagai penguasa kerajaan Usmani dan kelompok pembaruan mengambil kebijaksanaan untuk melemahkan kekuatan politik para ulama. Tetapi ia harus hati-hati agar tidak mengalami nasib yang sama menimpa Sultan Salim III. Sultan berusaha mengakomodasi kekuatan-kekuatan yang beraneka ragam sambil perlahan-lahan merekrut orang yang sepaham dengannya dari elite golongan ulama dan *Jenissery* kemudian menempatkan mereka pada posisi penting. Target pertama dalam pembaruan Sultan Mahmud II, adalah melemahkan oposisi kelompok ulama konservatif dalam pemerintahan kerajaan Turki Usmani, melalui pencabutan otonomi administrasi lembaga keagamaan dan sistem sumbangan keagamaan diperbarui. Dalam hal ini ulama kehilangan kontrol mereka atas sumber finansial dan masyarakat. (Mukti, 1994, p. 36)

Tahun 1826 ia membentuk suatu korps militer baru yang diasuh instruktur-instruktur militer yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasya dari Mesir. Ia menghindari instruktur-instruktur dari Eropa atau Kristen, yang dimasa lampau mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pembaruan. Para perwira tinggi *Jenissery* menyetujui pembentukan korps baru ini tetapi perwira dibawahnya menolak dan menyatakan pemberontakan. (Siti Maryam, 2017, p. 143)

Dengan restu *Syekh al Islam* Sultan Mahmud II memerintahkan tentara baru untuk memadamkan pemberontakan *Jenissery* dan diwaktu yang bersamaan *Jenissery* dibubarkan. Bagi ulama konservatif pembubaran *Jenissery* merupakan tamparan keras terhadap peran mereka di kerajaan Turki Usmani. Pembubaran itu berarti tidak ada lagi kekuatan militer yang dapat membantu interes-interes ulama. Hilangnya *Jenissery*, golongan ulama yang anti pembaruan juga sudah lemah kekuasaannya. Sokongan dari penduduk ibukota selama ini dapat diperoleh melalui *Jenissery* dan Bektasyi tidak mudah lagi dibangkitkan. Usaha-usaha pembaruan abad ke-19 dengan demikian mulai dapat berjalan lancar. Dengan makin melemahnya kekuatan oposisi, Sultan Mahmud II mulai membenahi birokrasi. Kekuasaan-kekuasaan luar biasa yang

---

menurut tradisi dimiliki para pejabat negara dibatasi. Tradisi protokoler kerajaan dihapuskan dan para pejabat dianjurkan mengganti pakaian kebesaran tradisional dengan setelan ala Barat. (Usman, 2016, p. 394)

Dalam bidang pendidikan sekolah umum didirikan di daerah-daerah, seperti Sekolah Pengetahuan Umum dan Sekolah Sastra. Sekolah yang pertama bertujuan mempersiapkan siswa untuk menjadi tenaga administratif sedangkan sekolah yang kedua dipersiapkan untuk menjadi penerjemah. Madrasah tetap diakui pengetahuan umum dan keterampilan praktis dimasukkan dalam kurikulumnya.

Ditingkat perguruan tinggi di samping mendirikan akademi militer dan mengirim para pelajar keluar negeri seperti Perancis, Inggris, Jerman. Sultan Mahmud II juga mendirikan sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah perbendaharaan.

Pembaruan yang dilakukan Sultan Mahmud II, makin memperjelas arah pembaruan kerajaan Turki Usmani berikutnya. Perubahan dalam bidang pendidikan melahirkan generasi baru terdidik ditengah masyarakat yang terbiasa dengan ide-ide modern. Sebagai kelas sosial, generasi baru ini memiliki perbedaan yang berarti bagi ulama. Mereka tampil sebagai elit dan pengajut gigi pembaruan. Ironisnya program-program Sultan Mahmud II tidak mampu membangkitkan kerajaan Turki Usmani, sebaliknya menjadi sangat tergantung kepada Eropa dalam hutang luar negeri dan alih teknologi. (Nasution, 1975, p. 84)

## **Gerakan Pembaruan Di Turki Usmani**

### **1. Era Tanzimat**

Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Sultan Mahmud II menjadi dasar dan usaha pembaruan selanjutnya di kerajaan Turki Usmani abad ke-19. Dalam perkembangan selanjutnya di kerajaan Turki Usmani terdapat tiga aliran pembaruan yaitu, aliran Barat, aliran Islam, dan aliran Nasionalis. Pembaruan yang dilakukan sebagai lanjutan dari usaha-usaha yang dijalankan Sultan Mahmud II dikenal dengan nama Tanzimat. (Supriyadi, 2008, p. 265)

Tanzimat merupakan serangkaian reformasi yang bertujuan mengembalikan kekuasaan kesultanan yang merosot tajam dan menyelamatkannya dari pendudukan Eropa. Serangkaian reformasi ini dilakukan dengan menata ulang pemerintah, pemerintahan, dan berbagai bidang kehidupan Usmani sejalan dengan cara Barat. Pemuka utama dari pembaruan di era ini adalah Rasyid Pasya, Mustafa Sami, dan Rifat Pasya. (Vahide, 2007, p. 40)

Tahun 1839 Sultan Abdul Majid I dilantik menjadi Sultan Usmani menggantikan Sultan Mahmud II. Pembaruan berusaha untuk memperkuat dan

---

memodernisasi kerajaan. Untuk mendukung program pembaruan, Sultan Abdul Majid I mengeluarkan piagam Gulhane (*Hatt i Sherif Gulhane*). Program pembaruan menitikberatkan pada bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, militer dan kaum minoritas.

Dalam bidang hukum anggota dewan hukum (*Meclis i Ahkam Adliye*) yang dibentuk pada masa Sultan Mahmud II diperbanyak dan diberikan kekuasaan membuat undang-undang. Sementara dibidang pemerintahan pembaruan adanya keterlibatan rakyat untuk memberikan pendapat tentang persoalan-persoalan negara dan administrasi. Dibidang perbankan dengan didirikannya bank Usmani pada tahun 1840, selain itu mata uang lama ditarik dari peredaran dan diganti dengan mata uang baru dengan sistem desimal. Dibidang pendidikan, pendidikan umum dilepaskan dari kekuasaan kaum ulama dan diserahkan pada kementerian pendidikan yang dibentuk pada tahun 1847. (Usman, 2016, p. 155)

Pada tahun 1856 diumumkan piagam Humayun (*Hatt i Humayun*) dengan tujuan untuk memperkuat piagam Gulhane. Piagam ini dikeluarkan atas desakan negara-negara Eropa kepada kerajaan Usmani yang waktu itu telah dalam keadaan lemah dan selalu mengalami kekalahan perang. (Nasution, 1975, p. 94) Sebenarnya piagam ini menuntut adanya pembaruan terhadap kedudukan orang Eropa yang dibawah kekuasaan kerajaan Turki Usmani.

Dalam piagam ini bahwa masyarakat Kristen dan non muslim lainnya dibolehkan mengadakan pembaruan yang diperlukan dan mendirikan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan tanah pemakaman. Untuk itu semua perbedaan yang timbul karena perbedaan agama, bahasa, dan bangsa dihapuskan. Kebebasan beragama dijamin dan paksaan untuk mengubah agama dilarang dan seluruh warga kerajaan Turki Usmani juga dapat menjadi pegawai kerajaan. Selain itu piagam Gulhane juga mengandung sejumlah pembaruan diantaranya pengadaan anggaran belanja tahunan negara, pembukaan bank-bank asing, pembuatan regulasi dagang, penghapusan hukum bunuh orang yang keluar dari Islam masuknya orang-orang non muslim dalam dewan hukum. Pembaruan yang dijalankan di zaman Tanzimat tidak seluruhnya mendapatkan penghargaan. Bahkan mendapatkan kritik dari kaum intelegensia kerajaan Turki Usmani yang ada pada waktu itu, kritik ditujukan pula terhadap sikap pro Barat yang dianut pemuka-pemuka Tanzimat. (Faqih, 1997, p. 87)

## **2. Gerakan Usmani Muda**

Gerakan intelegensia kerajaan Turki Usmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan dikenal dengan nama Usmani Muda. Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan tokoh-tokoh Usmani Muda yang mempengaruhi pembaruan yang

---

diadakan sesudah zaman Tanzimat. Usmani Muda pada awalnya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan tahun 1865, dengan tujuan untuk mengadakan pengawasan terhadap kekuasaan sultan dan mengubah kekuasaan absolut kerajaan Usmani menjadi pemerintahan konstitusional. (Mukti, 1994, p. 45)

Tokoh utama dalam gerakan pembaruan ini Ziya Pasya, Namik Pasya, Midhat Pasya, dan Ali Sepkati. Secara umum ide pembaruan yang ditawarkan kelompok Usmani Muda adalah negara yang baik adalah negara yang mengakui kedaulatan rakyat, mengakui hak-hak rakyat, dan pemerintah demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut Namik Pasya kegagalan pembaruan Tanzimat disebabkan oleh politik dan ekonomi yang tidak beres. Pembaruan yang selama ini lebih mewakili kepentingan sultan dari pada memberi kesempatan masyarakat untuk terlibat. Kekuasaan absolut sultan telah mengkhianati kedaulatan rakyat. Pemerintahan konstitusional bukan hal baru dalam tradisi Usmani. Ulama dan kepala negara masing-masing mempunyai tugas yang jelas dalam sistem demokrasi Islam. Begitu juga dalam pemerintahan Turki Usmani yang lama.

Kalau ditanggalkan sifat otokratisnya, ulama memegang kekuasaan legislatif, sultan beserta para menteri melaksanakan fungsi eksekutif, kontrol berada di tangan *Jenissery* sebagai komponen masyarakat bersenjata. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah sistem pemerintahan menjadi konstitusional dan pengakuan hak-hak politik rakyat yang dijamin undang-undang. Sultan berkuasa berdasarkan kedaulatan rakyat melalui sistem perwakilan. Dalam mengatur negara Sultan yang juga memegang jabatan Khalifah tidak boleh melanggar syariah karena itu merupakan konstitusi yang harus dipatuhi kepala negara. (Siti Maryam, 2017, p. 144)

Kematian perdana menteri Ali Pasya, menandai berakhirnya zaman Tanzimat. Tahun 1872 Mihdat Pasya yang dilantik menjadi perdana menteri, adalah seorang negarawan yang luar biasa. Namun kedekatannya dengan Usmani Muda menyebabkan ia selalu bentrok dengan kekuasaan absolut Sultan. Mihdat Pasya dipecat dalam masa jabatan yang belum berumur satu tahun. Pemecatan Mihdat Pasya karena kebijakannya yang menginginkan pemerintah demokrasi, undang-undang dan kemerdekaan dan hal ini tentu saja bertabrakan dengan Sultan Abdul Aziz. Untuk beberapa tahun, pemerintah kembali dikuasai kelompok konservatif. Pada saat yang sama perekonomian kerajaan makin memburuk, Bulgaria, dan Serbia menyatakan pemberontakan terhadap Istanbul. Sultan Abdul Aziz akhirnya harus mengakui pemerintahannya bangkrut. Pada tanggal 30 Mei 1876 ia dijatuhkan atas fatwa Syekh al Islam. (Muktil, 1995, p. 158)

---

Pada 31 Agustus 1876 Sultan Abdul Hamid dinobatkan menjadi Sultan, tiga bulan kemudian Mehmed Pasha dilantik menjadi perdana menteri. Pada tanggal 23 Desember 1876 Sultan Abdul Hamid menandatangani konstitusi Turki Usmani yang mencontoh negara Belgia. Dalam perkembangan selanjutnya ada perbedaan pemahaman antara Usmani Muda dengan Ulama mengenai term musyawarah, syaria, dan bai'ah. Para ulama memahaminya term itu kedalam pengertian yang terdapat dalam Islam sedangkan Usmani Muda memberi pengertian Barat, artinya musyawarah dalam Islam diatur dalam abad modern ini dengan apa yang dinamakan oleh orang-orang Eropa dengan parlemen.

Akibatnya konstitusi yang disahkan itu bukanlah dasar bagi pemerintahan demokratis, melainkan kekuasaan absolut Sultan Abdul Hamid mendapat legitimasi Konstitusi. Pemerintahan konstitusional tidak berlangsung lama karena tidak adanya dukungan dan pengawasan yang tepat. Tahun 1878 dengan alasan rakyat tidak memiliki kemampuan melaksanakan pemerintahan konstitusional, ia membubarkan parlemen tahun 1878. (Siti Maryam, 2017, p. 148)

Sultan Abdul Hamid, dengan sentralisasi pemerintahan yang telah dicitakan pada zaman Tanzimat, menjalankan pemerintahan yang otokratis dan menjadikan dirinya despot, yang sama mutlaknja seperti nenek moyangnja dulu selama tiga puluh tahun lebih. Ia melarang gerakan oposisi dan mengasingkan para politisi yang berseberangan dengannya. (Stoddard, 1966, p. 64)

Peran Islam, dalam pemerintahan Sultan Abdul Hamid adalah memberikan legitimasi. Ia menghidupkan kembali tarekat dan menjadikannya media komunikasi dengan masyarakat desa. Kebijakan itu membuat Sultan Abdul Hamid mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang menyakini sekulerisme inheren dalam pembaruan westernisasi dan menjadi ancaman Islam. Sultan Abdul Hamid, bukanlah Sultan yang secara konsisten menentang pembaruan westernisasi. Sultan Abdul Hamid memiliki pemahaman tersendiri dalam mengadopsi peradaban Barat untuk negaranya. Sultan hanya menghendaki pengadopsian sistem Barat yang diperlukan saja seperti pengadopsian ilmu pengetahuan kontemporer. (Harb, 2013, p. 15)

### **3. Gerakan Turki Muda**

Sultan Abdul Hamid setelah dibubarkannya parlemen dan hancurnya gerakan Usmani Muda terus memerintah dengan kekuasaan absolut. Pemerintahannya banyak ditentang oleh kaum intelektual yang dipengaruhi pemikiran Barat, golongan pegawai sipil dan juga dari kalangan militer. Dalam kondisi demikian timbul gerakan oposisi terhadap pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Oposisi dalam berbagai

---

kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Turki Muda. (Siti Maryam, 2017, p. 151)

Ide perjuangan Turki Muda antara lain dikemukakan oleh tiga tokohnya yaitu, Ahmad Reza, Mehemed Murod, dan Pangeran Sabahuddin. Sungguhpun ada perbedaan pandangan dan politik diantara ketiga pemuka diatas mereka sepakat untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Perkembangan selanjutnya yang sangat menentukan bagi gerakan oposisi adalah terciptanya kerjasama dengan *Ittikad ve Terekki* (Pesatuan dan Kemajuan). Salah satu komite atau sel rahasia yang muncul dikalangan militer.

Konferensi Turki Muda di Paris tahun 1907, menghasilkan kesepakatan diantara kelompok-kelompok oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan absolut Sultan Abdul Hamid. Komite *Ittikad ve Terekki* (Pesatuan dan Kemajuan) yang akan melaksanakan hasil konferensi tersebut. Tahun 1908 Sultan Abdul Hamid memberlakukan Konstitusi 1876, setelah pemberontakan oleh Komite dan oposisi yang dikenal revolusi Turki Muda.

Setelah berkuasa perbedaan ideologi di tubuh Turki Muda menjelma dalam bentuk pertentangan di parlemen. Kelompok Turki Muda yang liberal menghendaki pemerintahan otonomi bagi daerah-daerah. Sistem desentralisasi demikian akan memberi ruang bagi keragaman masyarakat, keutuhan dan kesatuan wilayah kerajaan didasarkan kepada penciptaan persemakmuran bangsa-bangsa Usmaniyah yang kuat.

Sebaliknya, kelompok Turki Muda dari Partai *Ittikad ve Terekki* yang menjadi pemenang dalam pemilu 1908 ingin mempertahankan sistem pemerintahan sentralisasi dengan unsur Turki sebagai pemegang kekuasaan pusat. Diantara persamaan hak bagi setiap warga negara, perkumpulan dan gerakan atas nama agama, ras, atau kebangsaan merupakan ancaman kesatuan wilayah kerajaan. (Nasution, 1975, pp. 119-120)

Tahun 1909 terjadi kudeta terhadap pemerintahan Turki Muda yang dilancarkan oleh *Ittihad i Muhammadi*, suatu partai politik yang dipimpin oleh Dervish Vahdeti seorang pengikut tarekat Bektasyi. Mereka menuduh Turki Muda telah meruntuhkan syariah dan kekhilafan. Pemerintahan Turki Muda dapat dipulihkan kembali setelah pasukan militer dari Salonika dapat menguasai ibukota. Sesuai dengan fatwa *Syekh al Islam*, parlemen memberhentikan Sultan Abdul Hamid sebagai Sultan karena diduga berada dibalik aksi kudeta tersebut. (Nasution, 1975, p. 138)

Tahun 1912 diadakan pemilihan baru dan kali ini *Ittikad ve Terekki* (Pesatuan dan Kemajuan) menggantikan posisi golongan politisi dalam menguasai pemerintahan. Kekuasaan terletak ditangan tiga serangkai Enver Pasya, Talat Pasya, dan Jemal Pasya. Pemerintahan tiga serangkai merupakan pemerintahan militer yang ketat dan

---

tidak bisa menerima kritik. Partai-partai oposisi mereka bubarkan dan para pemimpinnya di asingkan keluar negeri. Dalam perang dunia I mereka membawa kerajaan Usmani menjadi sekutu Jerman. Kekuasaan mereka hancur dengan kalahnya pihak Jerman dalam peperangan itu. Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan membubarkan diri dan pemimpin-pemimpinnya lari keluar negeri.

## **Berdirinya Republik Turki**

### **1. Nasionalisme Turki**

Kesadaran nasionalisme Turki di kerajaan Usmani mulai timbul di pertengahan kedua dari abad ke-19. Daerah Usmani yang daerah kekuasaannya mencakup daerah-daerah Arab di sebelah Timur dan daerah-daerah Eropa Timur di sebelah Barat. Awalnya rakyat dikelompokkan berdasarkan agama masing-masing. Namun perasaan nasionalisme mulai mempengaruhi bangsa-bangsa yang berada dibawah kekuasaannya khususnya bangsa Eropa. (Kuncahyono, 2018, p. 76)

Pemikiran nasionalisme atau Turkisme tidak terlepas dari tokoh Ziya Gokalp. Nasionalisme menurut Gokalp sintesis antara modernisme, Islamisme, dan Turkisme. Tujuan dari sintesisnya adalah mendirikan negara Turki Islam modern. Ide pemikiran Turkisme atau nasionalime dalam pandangan Gokalp bersumber dari budaya atau menggunakan pendekatan sosial. Bagi Gokalp, suatu perubahan politik tidak akan berarti apa-apa kecuali jika diikuti sosiokultural.

Tujuan akhir Turkisme Gokalp adalah menumbuhkan kebudayaan nasional yang bukan bertitik tolak dari syariah, bukan kebudayaan pra Islam, dan bukan pula kebudayaan Barat. Bagi Gokalp adalah tidak terdapat kontradiksi inheren antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara Turkisme, komunitas religius (umat), dan komunitas internasional (modernisme atau sekulerisme). Karena masing-masing kebudayaan memberikan jawaban yang berbeda terhadap masalah, sehingga secara sinergis merujuk pada kebudayaan Turki Islam, sambil melengkapi diri dengan piranti nalar, ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban modern. (Nasution, 1975, p. 150)

Dalam pandangan Gokalp, faktor religius tidak lagi mutlak menjadi sebuah moralitas dan solidaritas sosial. Oleh karena itu pikiran-pikiran teokratis harus dibersihkan dari perseolan politik. Sehingga pada akhirnya, ia merekomendasikan mufti tertinggi di Turki dihapuskan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Turkisme dalam pandangan Gokalp memisahkan agama dari negara dengan tujuan untuk mengakhiri dominasi Islam dalam persoalan sosial politik Turki dan lebih jauh lagi memisahkan agama dari peradaban Timur sehingga memberi peluang besar terhadap peradaban Barat serta kebudayaan nasional Turki. (Nasution, 1975, p. 155)

## **2. Lahirnya Republik Turki**

Lahirnya Republik Turki, dilatarbelakangi kekalahan kerajaan Usmani dalam Perang Dunia I, sehingga tentara sekutu masuk dan menduduki wilayah kerajaan Usmani. Dalam suasana kacau ini muncul Mustafa Kemal, seorang Turki baru yang menyelamatkan kerajaan Usmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dari penjajahan Eropa.

Setelah Perang Dunia I, Mustafa Kemal diangkat menjadi panglima militer di Turki Selatan. Tugasnya adalah merebut Izmir dari tangan tentara sekutu. Ia berhasil memukul mundur tentara sekutu dan berhasil menyelamatkan Turki dari penjajahan Barat. Bersama teman-temannya, Mustafa Kemal mulai menentang Sultan di Istanbul karena perintahnya dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional Turki, karena Sultan berada dibawah kekuasaan sekutu dan harus menyesuaikan diri dengan kehendak mereka.

Mustafa Kemal melihat perlunya diadakan pemerintahan tandingan di Anatolia. Segera ia dengan rekan-rekannya tersebut mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan-pernyataan; Pertama, kemerdekaan tanah air dalam keadaan bahaya. Kedua, sultan tidak dapat menjalankan pemerintahan karena berada dibawah kekuasaan sekutu. Ketiga, rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan tanah air dari kekuasaan asing. Keempat, gerakan pembela tanah air harus dikoordinasi oleh panitia nasional. Kelima, untuk merealisasikan hal-hal tersebut, perlu diadakan kongres. Karena pernyataan tersebut, Mustafa Kemal diperintahkan untuk datang ke Istanbul, tetapi ia menolaknya. Karena penolakan itu ia dipecat dari jabatannya sebagai panglima. Mustafa Kemal, keluar dari militer kemudian ia dipilih sebagai ketua Perkumpulan Pembela Hak-hak Rakyat cabang Emirum. (Nasution, 1975, p. 140)

Kongres pertama diadakan di Erzurum yang merekomendasikan untuk membela, mempertahankan keutuhan tanah air, dan perlu diadakan rapat Majelis Nasional dalam waktu secepatnya. Kongres kedua di adakan di Sivas, dalam kongres ini diputuskan bahwa Turki harus merdeka dan untuk itu dibentuk Komite Perwakilan Rakyat, dan Mustafa Kemal terpilih sebagai ketua. Tahun 1920, Golongan nasional menjadi pemenang Pemilu dan Majelis Nasional Agung berhasil dibentuk. Dalam sidang Majelis Nasional Agung di Ankara, Mustafa Kemal terpilih sebagai ketua.

Dalam sidang tersebut diambil keputusan-keputusan, Kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat, Majelis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi, Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan badan eksekutif, Majelis Negara yang anggotanya terpilih dari Majelis Nasional Agung akan

---

menjalankan tugas pemerintah, Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan ketua Majelis Negara.

Mustafa Kemal memimpin Turki dengan jargon westernisasi, sekulerisme, dan nasionalisme. Tujuan pokoknya mendirikan sebuah negara modern dimana westernisasi yang menentukan batas-batas pembaruan. Konsep nasionalisme dipahami bukan dalam konteks nasional tetapi dalam konteks Barat, bangsa Turki akan eksis bukan sebagai kelompok rakyat yang memiliki kesamaan masa silam, tetapi sebagai kelompok rakyat yang memiliki kesamaan masa depan di antara bangsa-bangsa Barat yang ber peradaban. (Toprak, 1999, p. 70)

Pembaruan-pembaruan yang dilakukannya Pertama, pemisahan antara pemerintahan dengan agama (sekulerisme) ide ini diterima di Majelis Nasional Agung. Kedua, kedaulatan Turki bukan di tangan Sultan tetapi ditangan rakyat. Ketiga, jabatan khalifah dipertahankan tetapi hanya memiliki kewenangan spritual, sedangkan kewenangan duniawinya sebagai Sultan ditiadakan (1922). Keempat, khalifah Wahid al-Din dipecat dari jabatannya karena dianggap sebagai pengkhianat, dan Abdul Majid diangkat sebagai penggantinya. (Siti Maryam, 2017, p. 160)

Kelima, merubah bentuk negara dari Khalifah menjadi Republik, dan Islam menjadi agama negara. Keenam, karena Khalifah dianggap membangkang karena melakukan kegiatan-kegiatan politik seperti menerima tamu dari negara lain, mengirim duta keluar negeri, dan mengadakan kegiatan upacara kebesaran pada hari Jumat, dan tetap tinggal di istana Istanbul, 3 Maret 1924 MNA memutuskan bahwa jabatan khalifah dihapus karena dianggap melahirkan dualisme kepemimpinan khalifah Abdul Majid beserta keluarga minta suaka ke Swiss. Ketujuh, tahun 1937 Turki mendeklarasikan sebagai negara sekuler dengan menghapus Islam sebagai agama negara. Sebelum menjadi negara sekuler, Mustafa Kemal telah meniadakan institusi-institusi kegamaan dalam pemerintahan, seperti penghapusan Biro *Syekh al Islam* (1924), Kementerian Syariat, dan Mahkamah Syariat. (Supriyadi, 2008, p. 267)

Sebagai bagian dari proses sekulerisasi, Mustafa Kemal kemudian memutuskan untuk meniadakan pelajaran bahasa Arab dan Persia disekolah-sekolah, meniadakan pendidikan agama di sekolah-sekolah, menerjemahkan Al-Quran kedalam bahasa Turki agar dipahami masyarakat, khotbah Jumat harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Turki, dan adzan menggunakan bahasa Turki.

### **Republik Turki Pasca Mustafa Kemal**

Setelah Mustafa Kemal meninggal pada tahun 1938, Ismet Inonu menjadi presiden Republik Turki. Militer Turki mengambil peran sebagai penjaga ideologi Kemalisme. Ideologi yang dicetuskan oleh Mustafa Kemal ini dianggap sebagai

# HISTORIA ISLAMICA

## Journal of Islamic History And Civilization

<http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/historia/index>

(E-ISSN: 2988-361X)

Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2023

---

prinsip negara Turki. Dinamika politik Republik Turki pasca Kemal mengalami pasang-surut. Untuk mengimbangi pemerintahan yang hampir absolut berdirilah partai politik yaitu, Partai Demokrat sebagai penyeimbang. dibawah kepemimpinan Celal Bayar seorang mantan perdana menteri.

Pemilihan umum 1946 partai Demokrat memperoleh 60 kursi dari 465 kursi. Kebebasan bicara dan pers semakin dibuka, Demokrat mulai mengorganisasi secara sungguh-sungguh kekuatannya. Sebelum pemilihan umum tahun 1950 sebuah undang-undang pemilihan baru diberlakukan. Pada pemilu tahun 1950 partai Demokrat memenangkan 408 kursi parlemen sehingga membawa partai Demokrat berkuasa dengan Celal Bayar menjadi presiden dan Adnan Menderes sebagai perdana menteri sementara Inonu menjadi oposisi. (Supriyadi, 2008, p. 270)

Untuk memberikan respon terhadap warga pedalaman yang mendukungnya, rezim baru ini mengizinkan penyampaian pendidikan agama di sekolah-sekolah Turki, Masjid menerima kembali subsidi dari negara. Tidak mengherankan kalau kemudian gerakan kembali kepada agama timbul di Turki, mulai tahun 1950 orang-orang Turki telah dibolehkan naik haji ke Mekah.

Dalam bidang politik Islam juga telah mulai memainkan perannya. Namun Partai Demokrat cukup toleran terhadap dogma Kemalis bahwasanya hanya dengan sekulerisasi masyarakat Turki dapat menjadi negara modern ini dapat kita lihat dari kebijakannya yang menekan segala aktivitas thariqat sufi. (Mughni, 1997, p. 151)

Dengan proklamasi Republik Turki, dimana Turki dinyatakan sebagai negara sekuler dalam konstitusi, sekolah-sekolah agama semakin kurang diminati sampai tahun 1932-1933. Sejak November 1950, anak-anak di tingkat sekolah dasar sudah dikenalkan dengan pendidikan agama. Pada tahun 1951, tujuh sekolah Imam dan Khatib, setingkat sekolah menengah dibuka. Dan tahun 1952 mata pelajaran agama ditambahkan pada kurikulum institut desa, dan kurikulum sekolah menengah pada tahun 1956. Pada 18 Februari 1952, Turki menjadi anggota penuh NATO, pengakuan akan keanggotaan Turki sebagai bagian dari NATO, memberikan keyakinan bahwa Turki bagian dari Eropa dan menguatkan statusnya sebagai negara maju dengan modernisasi sekulerismenya. (Lapidus, 1999, p. 94)

Pada April 1960 terjadi gerakan massa, yang menuntut agar pemerintahan memberikan hak berbicara dan agar tidak adanya intimidasi kepada jurnalis yang menyampaikan kritik. Sehingga atas desakan itu mayoritas suara demokrat di parlemen membentuk Komisi Penyelidikan yang terdiri dari lima belas orang, yang diberi kekuasaan untuk menyelidiki oposisi dan kelompok tertentu dari jurnalis. Tindakan itu menimbulkan protes di universitas-universitas Ankara dan Istanbul, yang mengundang tindakan keamanan pada 27 Mei 1960. Setelah sebulan

---

dikeluarkannya Hukum Darurat, tentara mengambil alih kekuasaan. Keadaan itu menyebabkan jatuhnya pemerintahan Menderes.

Sebuah Komite Persatuan Nasional, yang terdiri dari 38 perwira dibawah kepemimpinan Jenderal Kemal Gursel, menyatakan badan itu sebagai perwujudan dari *Grand National Assembly* (Parlemen Nasional Raya). Pemerintah sementara dibentuk, dengan Gursel sebagai kepala Negara. Pada maret 1966 Gursel, yang menderita stroke digantikan oleh Cevdet Sunay, jabatan sebelumnya sebagai Kepala staff umum. Berkat kebijaksanaannya, perpecahan antara militer dan politisi sipil dapat berakhir. (Mughni, 1997, p. 152)

### **Kesimpulan**

Uraian di atas tersebut dapat ditarik simpulan bahwa, sesungguhnya Penetrasi Barat ke wilayah kerajaan Usmani telah membuka pintu pembaruan di kerajaan Usmani, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran baru yang muncul untuk menjelaskan sebab kemajuan Barat dan kemunduran kerajaan Usmani.

Dalam usaha pembaruan di kerajaan Usmani terdapat tiga aliran pembaruan, yaitu aliran Barat, aliran Islam, dan aliran Nasionalis. Menurut aliran Barat kemunduran kerajaan Usmani disebabkan syariat yang menguasai seluruh segi kehidupan kerajaan Usmani. Oleh karena itu, kerajaan Usmani akan maju apabila menjadikan Barat sebagai guru. Menurut pandangan aliran Islam, agama (syariat Islam) tidak pernah menjadi penghalang kemajuan, Turki justru mundur karena tidak menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu syariat mesti diberlakukan di Turki agar Turki bisa maju. Adapun aliran Nasionalis berpendapat bahwa Turki mundur disebabkan oleh keengganan umat Islam yang tidak mengakomodir perubahan-perubahan.

Pembaruan tersebut lahirlah negara Republik Turki, yang dilatarbelakangi untuk menyelamatkan kerajaan Usmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dari penjajahan Eropa. Mustafa Kemal tokoh dibalik berdirinya Republik Turki, ialah pencipta Turki modern.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Faqih, A. R. (1997). *Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: UINSUKA Pres.
- Harb, M. (2013). *Memoir Sultan Abdul Hamid II, Terj. Masturi Irham & Mujiburahman*. Jakarta: Pustaka Al Kaustar.
- Kuncahyono, T. (2018). *TURKI: Revolusi Tak Pernah Henti*. Jakarta: Kompas.

# HISTORIA ISLAMICA

## Journal of Islamic History And Civilization

<http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/historia/index>

(E-ISSN: 2988-361X)

Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2023

- 
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam, Terj. Ghufron A. Mas'adi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughni, S. A. (1997). *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*. Jakarta: Logos.
- Mukti, A. (1994). *Islam dan Sekulerisme di Turki modern*. Jakarta: Djambatan.
- Muktil, A. (1995). *Alam Pikiran Islam Modern Di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan.
- Nasution, H. (1975). *Pembaruan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Setiadi, E. M., & Usman, K. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Siti Maryam, d. (2017). *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: LESFI.
- Stoddard, L. (1966). *Dunia Baru Islam, Terj. Muljadi Djojomartono*. Djakarta: Menko Kesedjateraan RI.
- Supriyadi, D. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Toprak, B. (1999). *Islam Dan Perkembangan Politik Turki, Terj. Karsidi Diningrat R.* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Usman, A. R. (2016). *Jejak-Jejak Islam*. Yogyakarta: Bunyun.
- Vahide, S. (2007). *Biografi Intelektual Biduizzaman Said Nursi Transformasi Dinasti Usmani Mejadi Republik Turki, Terj. Sugeng Haryanto dan Sukono*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zurcher, E. J. (2003). *Sejarah modern Turki, Terj. Karsidi Diningrat R.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.